

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa yang membantunya untuk mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawaarganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini memberikan wacana dan paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip keterbukaan.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (KAUR), kepala seksi (KASI), dan unsure kewilayahan atau kepala dusun (KADUS) yang ada di setiap pemerintahan desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistik.

Sudah menjadi idaman dari masyarakat negara-negara di dunia jika kepala pemerintahan desa mengembangkan pemerintahan yang baik, sehingga kepala pemerintahan desa mampu mengelola pemerintahan secara baik (*good governance*). Selama ini banyak kalangan masyarakat memandang terhadap pemerintahannya sendiri yang dirasa kurang simpatik dan cenderung bersikap sebagai penguasa daripada pelayan masyarakat. Tuntutan dan tantangan pemerintah desa di era reformasi ini adalah mengembangkan *good governance* di mana kepala desa mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemimpinnya. Menurut Mustafa (2013:186-187), *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “baik” di sini adalah mengikuti kaidah kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Kunci utama untuk memahami *good governance* adalah pemahaman prinsip-prinsip didalamnya. Bertitik tolak dari prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*, yaitu: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam Sakapurnama (2012:15), merumuskan prinsip *good governance* meliputi wawasan kedepan (*visionary*), transparansi, partisipasi, pertanggung jawaban, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme, daya tanggap, efisien dan efektif, desentralisasi, kemitraan dengan

dunia usaha dan masyarakat, komitmen pengurangan kesenjangan, komitmen pada lingkungan hidup, komitmen pada pasar yang fair. Menurut Kaloh (2009:172), *good governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Keinginan pemerintah beserta perangkat desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengembangkan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurut Sakapurnama, (2012:16) bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam *good governance* dan berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik. Keterbukaan informasi juga dipandang sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari demokrasi. Solihin (2006:10) dalam Sakapurnama (2012:16), menjelaskan transparansi merupakan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik.

Selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Anggapan tersebut tidak mengherankan jika adanya kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba – tiba dan pada akhirnya mendapatkan protes dan kritik dari masyarakat. Semua ini terjadi karena kurangnya transparansi seorang kepala desa dalam mengelola proses pemerintahan. Kurang transparannya sebuah pemerintahan akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kepala desa yang kurang transparan akan menimbulkan pemikiran yang buruk dari masyarakat salah satunya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintahan desa. Sangat penting jika prinsip tersebut dikembangkan dalam sebuah pemerintahan desa supaya dapat mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dari aparatur desa. Menurut Kaloh (2009:174), transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kepada masyarakat untuk

mengetahui berbagai aktivitas kepala desa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.

Permasalahan atau kendala yang sering dihadapi pada pemerintahan desa terkait prinsip transparansi yaitu mengenai pemberian akses informasi yang kurang memadai dan akurat terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tata kelola pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup. Penentuan usulan proyek atau kegiatan cenderung didominasi oleh pemerintah desa sedangkan masyarakat tidak dapat memberikan masukan mengenai kegiatan tersebut. Pengembangan prinsip transparansi di mayoritas desa umumnya masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kebijakan dan ketidak jelasan mekanisme dalam mengakses data. Hal tersebut terjadi akibat peran dari aparatur desa yang masih sangat rendah dan tidak adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat. Masalah tersebut dapat menjadi indikator peran dari perangkat desa dalam mengembangkan prinsip transparansi pada pemerintahan desa Pabelan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dipandang sangat penting jika mahasiswa calon guru PPKn melakukan penelitian mengenai “peran perangkat desa untuk mengembangkan prinsip transparansi dalam *good governance* pada pemerintahan desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo”.

A. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Adanya perumusan masalah diharapkan proses pemecahan permasalahan dapat terinci secara jelas, lebih terarah, dan terfokus. Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu pokok permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil pemerintahan di desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo?

2. Bagaimana peran perangkat desa untuk mengembangkan prinsip transparansi dalam *good governance* pada pemerintahan desa Pabelan?
3. Bagaimana kendala perangkat desa untuk mengembangkan prinsip transparansi dalam *good governance* pada pemerintahan desa Pabelan?
4. Bagaimana solusi mengatasi kendala untuk mengembangkan prinsip transparansi dalam *good governance* pada pemerintahan desa Pabelan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga harus dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti. Adanya tujuan penelitian, maka suatu masalah yang diteliti dapat dirumuskan secara jelas dan terarah serta akan mempermudah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan profil pemerintahan di desa Pabelan.
2. Untuk mendeskripsikan peran perangkat desa untuk mengembangkan prinsip transparansi dalam *good governance* pada pemerintahan desa Pabelan.
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi perangkat desa dalam mengembangkan prinsip transparansi pada pemerintahan desa Pabelan.
4. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi kendala dalam mengembangkan prinsip transparansi pada pemerintahan desa Pabelan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendapatkan teori baru mengenai peran perangkat desa untuk mengembangkan mengembangkan prinsip transparansi dalam membangun *good governance* pada pemerintahan desa.
 - b. Menambah wawasan dan pemahaman bagi pemerintah desa dalam mengembangkan *good governance*.

- c. Kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah Desa:

- 1) Untuk memberikan pandangan kepala desa dan perangkat desa mengenai pentingnya prinsip transparansi dalam pemerintahan desa sehingga tertarik untuk mengembangkannya.
- 2) Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kepala desa maupun perangkatnya agar kedepannya jauh lebih baik saat menjalankan tugasnya.
- 3) Meningkatkan kinerja aparatur desa termasuk kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan tugas.

b. Manfaat Bagi Masyarakat:

- 1) Memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa yang semakin baik.
- 2) Masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dari pemerintahan desa.
- 3) Memberikan kemudahan masyarakat dengan pelayanan yang baik dari pemerintahan desa.